

## ASPEK-ASPEK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN DANA DESA (STUDI KASUS KAMPUNG WAMESA DAN WARKOMI DI DISTRIK MANOKWARI SELATAN)

*(Sustainable Development Aspects in Desaning and Implementing Village Fund [Study Case in Wamesa and Warkomi, Sub-District of Manokwari Selatan])*

MEREYANA LUSANDRI NUMBERI<sup>1</sup>, AGUS I. SUMULE<sup>2</sup>, IHWAN TJOLLI<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi PPs Ilmu Lingkungan Universitas Papua,

<sup>2</sup>Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Papua

✉Penulis Korespondensi: Email: [mercy\\_luzandry@yahoo.co.id](mailto:mercy_luzandry@yahoo.co.id)

Diterima: 16 Feb 2021 | Disetujui: 27 Mei 2021

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini ialah ingin melihat aspek-aspek pembangunan dalam perencanaan dan pemanfaatan dana desa pada dua kampung yaitu Kampung Wamesa dan Warkomi, Distrik Manokwari Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling dengan konsep operasional penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembangunan berkelanjutan yang dibiayai oleh dana desa di Kampung Wamesa dan Warkomi termasuk dalam kegiatan: pengentasan kelaparan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan yang baik, peningkatan pendidikan bermutu, kesetaraan gender, peningkatan air bersih dan sanitasi, peningkatan energi bersih dan terjangkau, tersedianya lapangan kerja dan ekonomi yang layak, pemerataan sosial, peningkatan pemukiman. Sedangkan program yang tidak dibiayai ialah: industri, inovasi, infrastruktur, kota dan komunitas berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem darat, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Sementara kendala yang terjadi terlihat antara lain: keterbatasannya sumberdaya manusia yang terampil, terdidik dan memiliki kemampuan di bidang kerjanya, kurangnya pemahaman terhadap tupoksi kerja disebabkan karena terbatasnya tingkat pendidikan yang di tempuh.

**Kata kunci:** Pembangunan berkelanjutan, dana desa, perencanaan program

**Abstract.** This study aimed to identify various aspects of planning and development and implementing village fund in two villages, Wamesa and Warkomi, situated in sub-district of Manokwari Selatan. Purposive sampling method has been implemented in order to obtain information through operational research concept. The result indicated that sustainable development program that funded by village fund in both villages are consisting of several activities such as starving eradication, increasing healthy service and prosperity as well as education level, gender equality, expanding clean water availability and sanitation as well clean energy, providing more job opportunity and better economic accessibility, social equity, providing more settlements. On the other hand, there are several program that are not covered yet by village fund such as innovation and industrialization, infrastructure, city development, sustainable community, climate change, marine and terrestrial ecosystem, peace justice, and good governance as well as partnership for achieving goals. However, still a number of constrains are occurred such as lack of human resources with particular skills, educated and competent, lack of understanding in implantation programs that are linearly correlated with education background.

**Keywords:** Sustainable development, village fund, planning program

## PENDAHULUAN

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya kearah yang lebih maju. Pembangunan tidak terlepas dari lingkungan kehidupan di sekitar pembangunan itu berlangsung. Kota hijau merupakan metafora dari kota berkelanjutan dan kota berkembang, sehingga erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan pembangunan berbasis *green growth*. Pembangunan Berkelanjutan ialah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan untuk generasi di masa mendatang dengan menitikberatkan pada daya dukung lingkungan, pencapaian keadilan sosial, berkelanjutan ekonomi dan lingkungan.

Pembangunan berjalan secara fisik dan non-fisik ketika faktor utama sumber daya manusia (SDM) menunjang untuk terbangun secara selaras (Marwa dkk. 2019), maka dapat berjalan dengan lancar dan seimbang. Selain itu anggaran menjadi faktor pendukung dalam pembangunan, anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan desa/kampung, biasa di sebut dana desa. Dana ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang di kucurkan tiap tahun bergantung dari letak luas wilayah dan jumlah penduduk dalam desa tersebut.

Sejarah tentang *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan untuk tujuan sosial pada konferensi pertama Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam bidang lingkungan hidup di Stocklom Swedia pada tahun 1972. Diadakan konferensi tersebut dilatar belakangi oleh kekhawatiran dunia akan kemiskinan yang berkepanjangan dan meningkatnya ketidakadilan sosial, disertai kebutuhan pangan

dan masalah lingkungan dunia dan kesadaran bahwa ketersediaan sumber daya alam untuk

mendukung pembangunan ekonomi amatlah terbatas. Kecemasan tentang langkanya sumberdaya alam wajar dan dapat dilihat pada tulisan-tulisan sosial di masa lampau. Salah satu yang berpengaruh pada tulisan klasik Thomas Malthus (1798), "An Essay on the Principles of Population" dimana digambarkan sebuah ketakutan akan pertumbuhan populasi manusia, yaitu pembangunan industri yang cepat pada abad ke-19 disertai dengan polusi dan sentra pertumbuhan masyarakat yang tinggal dan bekerja dalam kondisi miskin di kota-kota besar. Sebuah era dari perubahan sosial masyarakat yang penuh masalah, kekauan sosial dan anarkisme, termasuk tumbuhnya gerakan yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan dan masyarakat pada sebuah populasi urban (Surtiani 2006).

Pada tahun 1960-an pergerakan perlawanan terhadap polusi lingkungan industri lebih memperhatikan pada inter relasi antara aktivitas manusia dan lingkungan alam. Dengan menggunakan sebuah pendekatan sistem dan model computer, pada tahun 1972 lahirlah *limit of growth*, salah satu proyek dari *Club of Rome*, sebuah organisasi individu yang memiliki kepedulian yang sama terhadap masa depan umat manusia, didanai oleh Volkswagen Foundation. Buku *limit of growth* mengkaji sebuah interaksi antara populasi, pertumbuhan industri, produksi pangan dan keterbatasan ekosistem di planet bumi. Gelombang literatur tentang pembangunan berkelanjutan kemudian semakin diperluas pada tahun 1980-an, ketika *the International Union for the Conservation of Nature Influential World Conservation Strategy* (1980) atau *Uni International* untuk konservasi alam mengajukan konsep pembangunan berkelanjutan, atau sebuah pembangunan yang mempertimbangkan fungsi ekosistem dan

keanekaragaman hayati agar terus dipertahankan.

Pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*earth summit*) di Rio de Janeiro Brasil pada tanggal 14 Juni 1992 paradigma pembangunan berkelanjutan diterima sebagai sebuah agenda penting untuk semua negara di dunia. Tapi tidak di implementasikan bahkan masih banyak belum di pahami serta dimengerti oleh negara dunia lainnya penyebab kegagalan implementasi paradigma tersebut karena kurang dipahami prinsip-prinsip kerja yang menjiwai seluruh proses pembangunan. Justru banyak yang memahami paradigma ini sebagai politik pembangunan dan munculnya *ideologi developmentalisme* sendiri saja. pertemuan ini memiliki arti etika politik pembangunan dimana sebuah komitmen moral tentang bagaimana seharusnya pembangunan itu di organisir dan dilaksanakan mencapai tujuan (Keraf 2002).

Di Indonesia, konsep kebijakan pembangunan berdasarkan kepada Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia telah masuk pada amandemen UUD 45 yang keempat pada tanggal 10 Agustus 2002. Konsep tersebut salah satunya dapat dijumpai dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Presiden Jokowi melalui acara *World Culture Forum* di Bali pada tanggal 10 – 14 Oktober 2016, yaitu *Culture for An Inclusive Sustainable Planet*, menyatakan pemerintah Indonesia sepakat bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen global yang harus bersama-sama diwujudkan dengan terus bekerja sama dan saling bertukar pengalaman. Konsep pembangunan berkelan-

jutan (*sustainable development*) lahir karena eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang tidak terkendali. Konsep ini terdiri dari tiga pilar utama yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Ketiga pilar tersebut harus berjalan secara harmonis.

Dengan memahami konsep dan tujuan pembangunan berkelanjutan, diyakini bahwa keberlangsungan hidup manusia dan kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat akan terus terjaga dalam kurun waktu yang lama dan berkelanjutan. Dalam undang-undang (UU) No.6 tahun 2014 tentang desa, telah membuka peluang bagi kampung-kampung untuk menjadi mandiri dan otonom serta ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat kampung tanpa terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa agar kampung menjadi mandiri dan dapat membangun sendiri serta mensejahterakan masyarakatnya. Kampung merupakan kawasan pemukiman kumuh dengan ketersediaan sarana umum buruk atau tidak ada sama sekali, kerap kawasan ini disebut *slum* atau *squater* (Turner 1972a). Kampung merupakan lingkungan tradisional khas Indonesia, ditandai ciri kehidupan yang terjalin dalam ikatan kekeluargaan yang erat kampung kotor yang merupakan bentuk permukiman yang unik, tidak dapat disamakan dengan *slum* dan *squater* atau juga disamakan dengan permukiman penduduk berpenghasilan rendah. Menurut Hendrianto (1992), perbedaan yang mendasari tipologi permukiman kumuh adalah dari status kepemilikan tanah dan nilai ekonomi lokasi (NEL).

Sejak di terbitkannya peraturan Menteri Desa Tertinggal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

Anggaran 2015 di BAB III Pasal 5 Berbunyi “prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan”. Selanjutnya diperkuat kembali dengan peraturan Menteri Desa No 13 Tahun 2020 BAB II terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 berbunyi “model pembangunan nasional didasarkan pada Perpres 59/2017: Pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan (TPB/SDGs)”. Dari beberapa peraturan menteri yang di tertulis di atas, maka membuat penelitian ini penting untuk di teliti, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Aspek-aspek Pembangunan Berkelanjutan Dalam Peman-faatan dan Perencanaan Dana Desa Study Kasus: Kampung Wamesa dan Kampung Warkomi di Distrik Manokwari Selatan”.

**METODE PENGAMATAN**

Penelitian ini dilakukan di Kampung Wamesa dan Warkomi dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* dengan teknik wawancara

struktural, pengamatan terhadap kegiatan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan konsep operasional penelitian. Data didapat dilapangan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik.

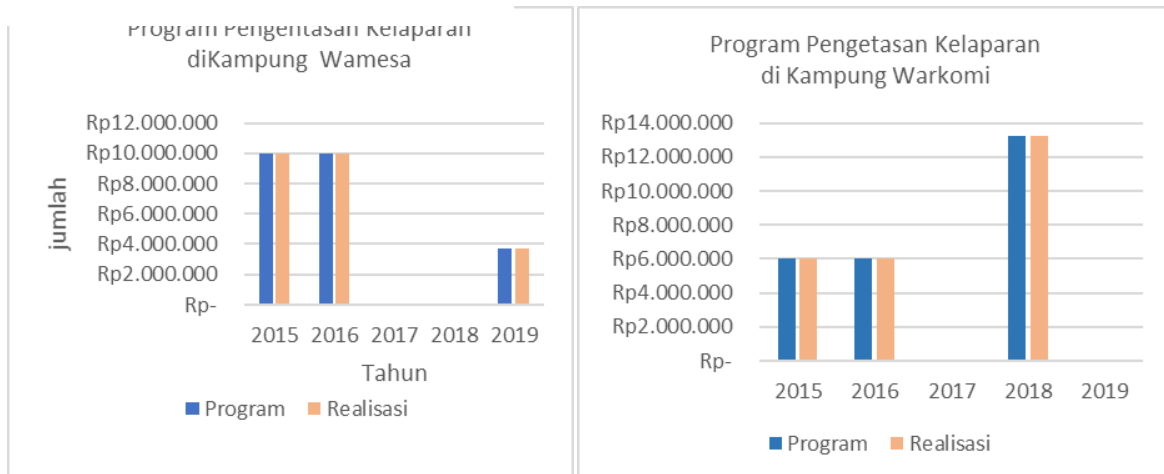
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Identifikasi Program Pembangunan Berkelanjutan dalam Dana Desa**

**Pengetasan Kelaparan Kampung Wamesa dan Warkomi**

Kelaparan didefinisikan sebagai kondisi kurangnya konsumsi pangan kronik (Lenhart 1989). Kelaparan serta kurang gizi tidak hanya menyerang anak kecil tetapi juga orang dewasa. Kelaparan kronis dapat menyebabkan: 1) tingginya tingkat kematian bayi; 2), rentan terhadap penyakit; 3) gangguan pertumbuhan dan kepandaian.

Pada Kampung Wamesa pengentasan kelaparan dilakukan kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT) kepada bayi, balita dan anak-anak serta lansia pada saat penimbangan dan pemeriksaan kesehatan lansia.



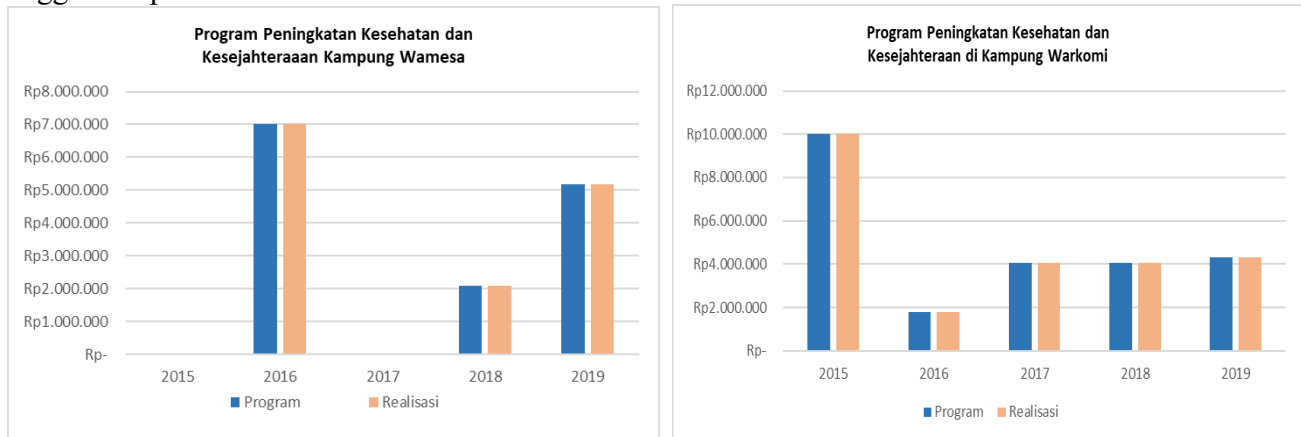
Gambar 1. Jumlah dan realisasi program pengentasan kelaparan pada ke dua kampung, Wamesa dan Warkomi

Pada Gambar 1 dilihat bahwa pada awal berlakunya dana desa tahun anggaran 2015 dan 2016 kegiatan pemberian makanan tambahan di rencanakan dan direalisasikan sebesar 10.000.000 dimana sumber anggarannya berasal dari otonomi khusus (Otsus) dan dana desa. di tahun 2017-2018 usulan PMT tidak masuk dalam program perencanaan tahun anggaran yang berjalan, karena pada kedua tahun itu program perencanaannya dilakukan kegiatan pada bidang pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Pada tahun berjalan 2019 Khusus kegiatan PMT dianggarkan kembali sebesar Rp 3.720.000 dari dana desa, pada Gambar 1 terbaca pagu anggaran PMT yang diusulkan turun karena pada tahun 2019 khusus kegiatan PMT merupakan swadaya masyarakat kampung.

Di Kampung Warkomi yang dilakukan yaitu pemberian makanan tambahan bayi dan balita pada tahun anggaran 2015 – 2016 dengan besaran anggaran Rp. 6.000.000 yang bersumber dari DDS maupun Otsus, setelah tahun berjalan usulan untuk PMT kembali di usulkan di tahun anggaran 2018 dengan besaran anggaran Rp. 13.240.397.

### Peningkatan Kehidupan Sehat dan Sejahtera Kampung Wamesa dan Warkomi

Kesehatan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan di suatu negara. Kegiatan kesehatan dan kesejahteraan berjalan bersama, sehingga kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup: 1) pelayanan kesehatan yang bermutu dan peningkatan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak; 2) penguatan sarana, prasarana dan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik pelayanan dasar dan rujukan; 3) penyehatan lingkungan; 4) peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan; 5) pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; 6) rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA; 7) pelayanan KB bagi perempuan usia reproduksi; 8) pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan usia reproduksi, termasuk remaja; dan 9) peningkatan ketersediaan SDM kesehatan. (Sulistiari dan Hargono 2018).



Gambar 2. Jumlah dan realisasi program peningkatan kesehatan dan kesejahteraan pada ke dua kampung, Wamesa dan Warkomi

Kampung Wamesa pada tahun 2016 direalisasikan insentif kader posyandu Rp

6.000.000 dan insentif dukun kampung Rp 1.000.000, tahun 2018 dibiayai BPJS

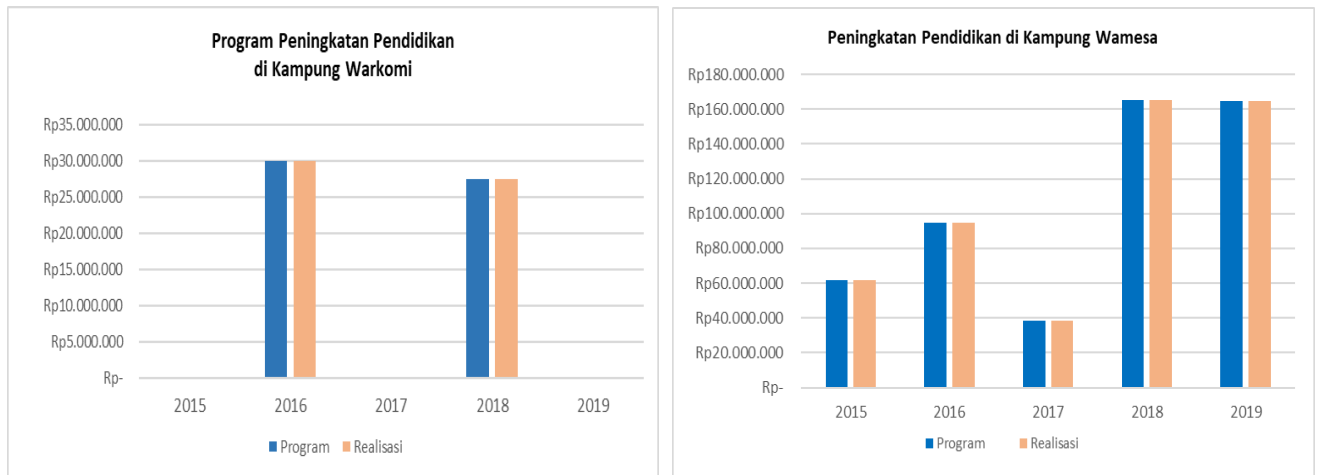
ketenagakerjaan bagi apatur kampung dan bamuskam sebesar Rp 2.088.000 begitu juga pada tahun 2019 ditambah pengadaan perlengkapan posyandu kampung sebesar RP 5.171.000.

Kampung Warkomi kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan obat-obatan sebesar Rp 8.000.000, insentif kader posyandu Rp 2.000.000 di tahun 2015, insentif kader posyandu Rp 1.800.000 di tahun 2016, insentif kader posyandu Rp 1.800.000, BPJS ketenaga kerjaan perangkat kampung Rp. 2.262.000 pada tahun 2017, insentif kader posyandu Rp 1.800.000, BPJS ketenaga kerjaan perangkat kampung Rp. 2.262.000 pada tahun 2018, dan

insentif kader posyandu Rp 1.800.000, BPJS ketenaga kerjaan perangkat kampung Rp. 2.496.000 pada tahun 2019.

**Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Kampung Wamesa dan Warkomi**

Pendidikan merupakan kemampuan untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM). Proses pendidikan adalah kemampuan memberi petunjuk bagi keberlangsungan kehidupan sesuai dengan tata nilai ideologis dan kultural bangsa. Peningkatan pendidikan mendukung terciptanya sumber daya manusia yang berpengetahuan, maju dan berkembang.



Gambar 3. Jumlah dan realisasi program peningkatan pendidikan pada ke dua kampung, Wamesa dan Warkomi

Kampung Wamesa meliputi: bantuan biaya pendidikan anak SD hingga kuliah sebesar Rp 60.500.000 dengan insentif tenaga pengajar PAUD sebesar Rp 1.000.000 di tahun 2015, Tahun 2016 bantuan biaya pendidikan anak SD-Kuliah sebesar Rp 91.00.000 dengan insentif kader PAUD Rp 3.800.000, tahun 2017 bantuan perlengkapan taman bermain PAUD

Rp 31.716.000, dan buku-buku pelajaran dan perlengkapan belajar PAUD Rp. 6.506.235, tahun 2018 peningkatan bangunan PAUD Rp

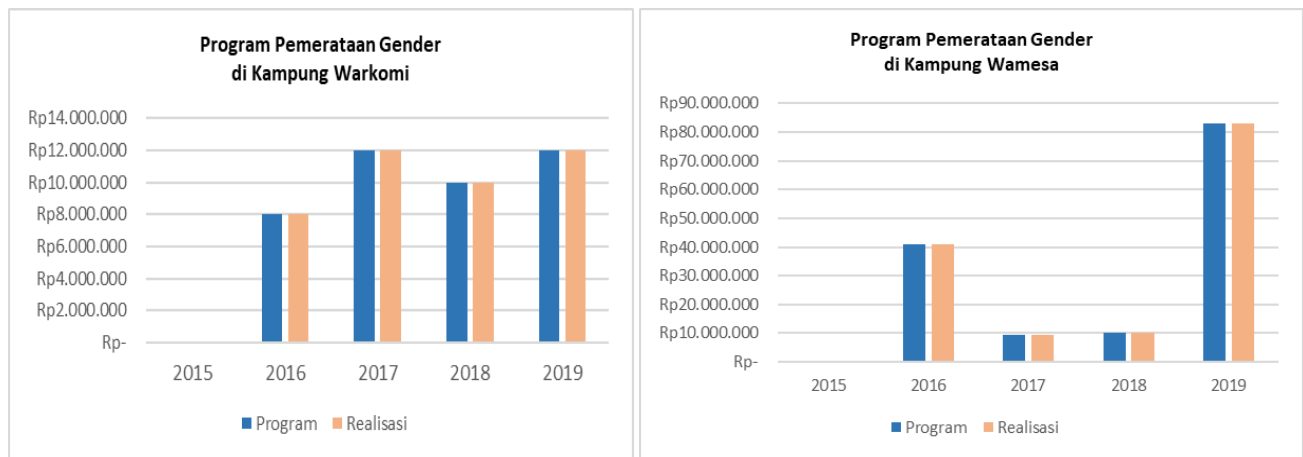
139.844.600 dan pengadaan pakaian seragam sekolah Rp 25.154.600, dan pada tahun 2019 diprogramkan bantuan pembangunan pagar gedung PAUD Rp 164.945.835. Pada Kampung Warkomi kegiatan pendidikan meliputi: bantuan beasiswa bagi siswa SD, SMP dan SMA DAN PT sebesar Rp. 30.000.000 dan bantuan pengadaan laptop dan komputer desktop sebesar Rp 27.474.000. Pada gambar grafik 3 terlihat bahwa peningkatan pendidikan hanya di lakukan pada tahun 2016 dan 2018 sedangkan 3 tahun lainnya tidak ada program

pendidikan di karenakan pendidikan dikampung warkomi tidak terlalu diperhatikan.

**Peningkatan Kesetaraan Gender di Kampung Wamesa dan Warkomi**

Gender dalam pengertian ilmu sosial diartikan sebagai pola relasi perempuan dan laki-laki yang didasarkan pada ciri sosial masing-masing. Tercakup di dalamnya adalah

pembagian kerja, pola relasi kuasa, perilaku, peralatan, bahasa, persepsi yang membedakan perempuan dengan laki-laki. gender adalah perbedaan dan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan sehingga gender belum tentu sama di tempat yang berbeda, dan dapat berubah dari waktu ke waktu (Raihan 2016).



Gambar 4. Jumlah dan realisasi program pemerataan gender pada ke dua kampung, Wamesa dan Warkomi

Kampung Wamesa kegiatan yang dilakukan antara lain: musyawarah kampung sebesar Rp 4.500.000, pertandingan futsall antar RT sebesar Rp 1.350.000, kegiatan karang taruna Sebesar Rp 5.000.000, musyawarah kampung khusus TA 2016 sebesar Rp 7.800.000 dan peningkatan kapasitas aparat kampung sebesar Rp 22.500.000 pada tahun 2016. di tahun 2017 dilakukan kegiatan musyawarah kampung tahun anggaran 2017 sebesar Rp 4.500.000 dan pelatihan peningkatan kapasitas aparat Rp 5.000.000. tahun 2018 dilakukan kegiatan musyawarah kampung tahun anggaran 2018 sebesar Rp 5.000.000 dan pelatihan peningkatan kapasitas aparat sebesar Rp 5.000.000. Sedangkan pada tahun 2019 dilakukan kegiatan musyawarah kampung

tahun anggaran 2019 sebesar Rp 3.000.000, pembangunan lapangan volly sebesar Rp 60.999.200, dan peningkatan kapasitas aparat kampung sebesar 8.000.00 dan pelatihan tanggap darurat bencana bagi masyarakat kampung sebesar Rp 11.070.000.

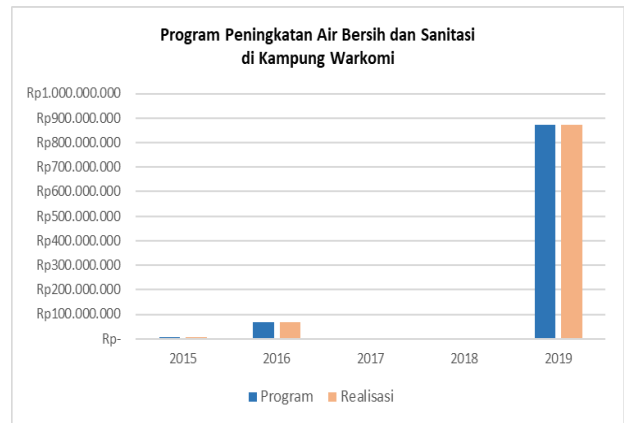
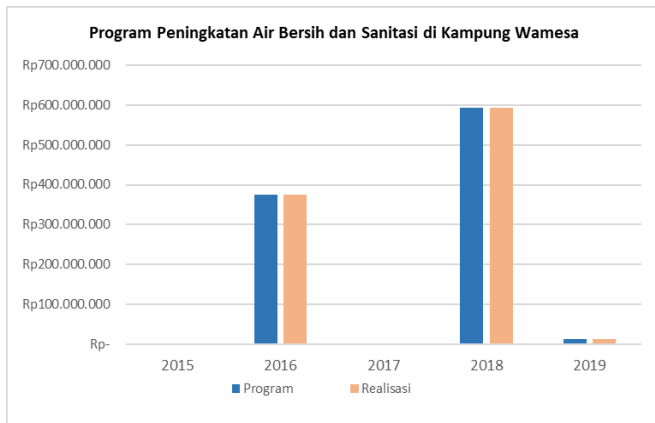
Kampung Warkomi melalui kegiatan musyawarah kampung sebesar Rp 3.000.000, dan pelatihan peningkatan aparatur kampung sebesar Rp 5.000.000 tahun anggaran 2016, di tahun 2017 dilakukan kegiatan musyawarah kampung tahun anggaran 2017 sebesar Rp 7.000.000 dan peningkatan kapasitas aparat kampung sebesar Rp 5.000.000, pada tahun 2018 kegiatan musyawarah kampung sebesar Rp 5.000.000 dan pelatihan aparat kampung sebesar Rp 5.000.000 dan di tahun 2019

dilakukan kegiatan musyawarah kampung sebesar Rp 3.000.000 dan pelatihan peningkatan kapasitas aparat sebesar Rp 9.000.000.

**Peningkatan Air Bersih dan Sanitasi Layak Kampung Wamesa dan Warkomi**

Air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang sangat dibutuhkan oleh manusia sebagai makhluk hidup, kebutuhan akan air bersih

menjadi permasalahan dewasa ini. Permasalahan kesehatan lingkungan seringkali terjadi disebabkan oleh kurangnya sumber air bersih serta sanitasi yang layak. Akper (2012) menyatakan bahwa sanitasi yang baik dan sumber air yang bersih akan mengurangi prevalensi penyakit, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi polusi dari sumber air.



Gambar 5. Jumlah dan realisasi program peningkatan air bersih dan sanitasi pada ke dua kampung, Wamesa dan Warkomi

Kampung Wamesa dalam program kegiatan peningkatan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat dari tahun 2016 dilakukan kegiatan pemeliharaan pembersihan parit dan selokan Rp 40.000.000, dan pembangunan selokan 940 m<sup>2</sup> sebesar Rp 335.563.106, di tahun 2018 dilakukan kegiatan pembangunan drainase sebesar Rp 592.236.800 dan di tahun 2019 di bangun menara profil tank beserta profil tank sebesar Rp 12.705.000

Kampung Warkomi kegiatan dari tahun 2015 dilakukan pemeliharaan rehab dan pembuatan bak penampung air Rp 6.650.000, di tahun 2016 dilakukan kegiatan air bersih sebesar 68.375.000 dan di tahun 2019 dilakukan kegiatan pipanisasi air bersih sepanjang 4600 m sebesar Rp 571.561.040, bak

penangkap air 3 × 3 × 1,50 m sebesar 30.825.710, jamban sebesar Rp 72.095.570, MCK sebesar Rp 31.953.610 dan bak intake (bak penampungan air) sebesar Rp 165.612.200.

**Peningkatan Penerangan / Listrik Kampung Wamesa dan Warkomi**

Sektor energi mempunyai peranan penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaan harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Kampung wamesa dilakukan pemasangan lampu jalan (pada rukun tetangga 01, 02 dan 03). Kegiatan program peningkatan yang di anggarkan dari dana desa berjalan di tahun 2016 sebesar Rp 35.806.098.



Gambar 6. Jumlah dan realisasi program peningkatan penerangan pada ke dua kampung, Wamesa dan Warkomi

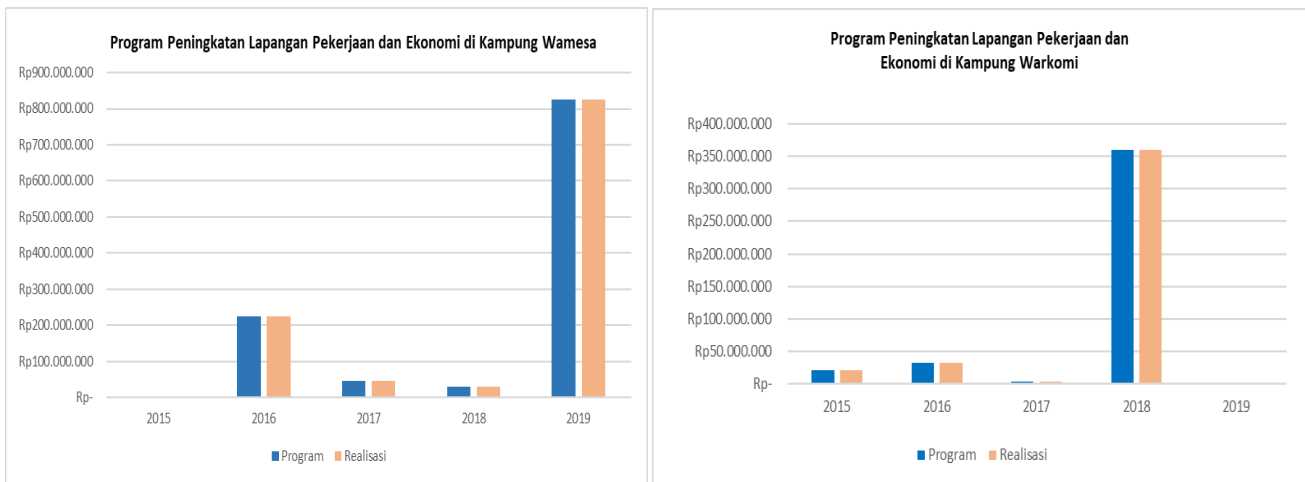
Sedangkan pada Kampung Warkomi dilakukan secara bertahap di 2 tahun berbeda yaitu pada tahun 2016 dilakukan kegiatan pemasangan aliran listrik sebesar Rp 2.625.000 dan pemasangan lampu jalan sebesar Rp 18.578.383. dan di tahun 2017 dilakukan kegiatan pengadaan meteran lampu sebesar Rp 75.000.000 dan pemasangan instalasi listrik 8 titik sebesar Rp 12.000.000.

**Tersedianya Lapangan Pekerjaan dan Ekonomi yang Layak Kampung Wamesa dan Warkomi**

Pertumbuhan ekonomi secara langsung mempengaruhi kehidupan pekerjaan secara berantai situasi ini menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya pembangunan yang dilakukan di negara berkembang Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan cepatnya pertambahan jumlah tenaga kerja, sedangkan kemampuan negara berkembang dalam menciptakan kesempatan kerja baru sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan perencanaan tenaga kerja guna mendukung

pembangunan nasional Indonesia (*manpower planning*) (Maulida 2016).

Kampung Wamesa programkan banyak kegiatan antara lain: pada tahun 2016 direalisasikan kegiatan bantuan kelompok ternak unggas sebesar Rp 119.607.000 Bantuan dana ekonomi bagi ibu-ibu sebesar Rp 59.000.000, peralatan bantuan mancing/nelayan sebesar Rp 27.458.000 dan bantuan pembenihan kolam ikan air tawar sebesar Rp 18.350.000. di tahun 2017 kemudian dianggarkan kembali peralatan bantuan mancing/nelayan sebesar Rp 27.458.000 dan bantuan pembenihan kolam ikan air tawar sebesar Rp 18.350.000. Pada tahun 2018 kemudian diprogramkan bantuan pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan sebesar Rp 30.000.000 dan di tahun 2019 diusulkan kegiatan Bumdes yang kegiatannya terbagi atas pengadaan mobil Bumdes sebesar Rp 191.450.000, Perlengkapan Bumdes sebesar Rp 159.905.680, Budidaya tanaman hias sebesar Rp 50.784.410, Bantuan bibit perikanan (bibit/pakan dll) sebesar Rp. 12.850.000 dan bantuan modal Bumdes sebesar Rp 410.338.090.



Gambar 7. Jumlah dan realisasi program peningkatan lapangan kerja dan ekonomi pada ke dua kampung, Wamesa dan Warkomi

Kampung Warkomi memiliki kegiatan kampung antara lain: bantuan usaha kelompok keripik umbi-umbian sebesar Rp 5.000.000, bantuan usaha kelompok kerajinan kulit kayu (ukir-ukiran) sebesar Rp 5.000.000, bantuan usaha kelompok kios mambruk sebesar Rp 5.000.000 dan bantuan usaha kelompok anyaman noken (sulam) sebesar Rp 5.000.000 di tahun 2015. Kemudian di tahun 2016 diprogramkan kembali ekonomi kerakyatan sebesar Rp 32.000.000, pada tahun 2017 dilakukan kegiatan pengadaan mesin jahit sebesar Rp 3.700.000 dan di tahun 2018 dianggarkan kegiatan pembangunan lapangan bola kaki untuk kampung, dengan tujuan agar dapat menambah PAD kampung ketika ada yang menyewa lapangan sebesar Rp 359.949.650.

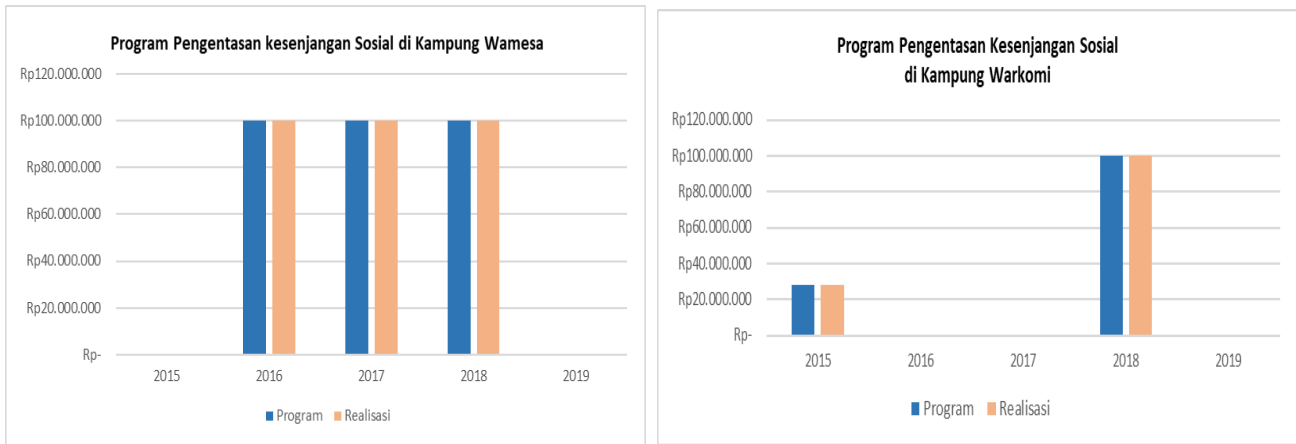
**Peningkatan Pemerataan Sosial Kampung Wamesa dan Warkomi**

Sistem desentralisasi yang diterapkan sejak lahirnya era reformasi merupakan bentuk penolakan terhadap sistem sentralisasi yang telah gagal dalam berbagai aspek untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia. Dari aspek ekonomi, sistem sentralisasi berpegang teguh pada konsep pusat pertumbuhan.

Pada Kampung Wamesa pemerintah kampung memprogramkan kegiatan untuk membantu masyarakat kampung antara lain: bantuan ekonomi kerakyatan 30 KK sebesar Rp 100.000.000 di tahun 2016, kemudian bantuan sosial 100 KK sebesar Rp 100.000.000 di tahun 2017 dan di tahun 2018 di programkan juga kegiatan yang sama bantuan sosial bagi 100 k sebesar Rp 100.000.000.

Sedangkan Kampung Warkomi memprogramkan kegiatan antara lain: bantuan ekonomi kepada 16 KK RT 01/RW 01 sebesar Rp 8.000.000, bantuan ekonomi kepada 9 KK janda dan duda sebesar Rp 4.500.000, bantuan ekonomi kepada 18 KK sebesar Rp 9.000.000, bantuan ekonomi kepada 7 KK janda dan duda RT 02/RW 02 sebesar Rp 3.500.000 dan bantuan ekonomi kepada 3 KK sebesar Rp 3.000.000 pada tahun 2015. Pada tahun 2018 diberikan bantuan sosial kepada masyarakat sebesar Rp 100.000.000.

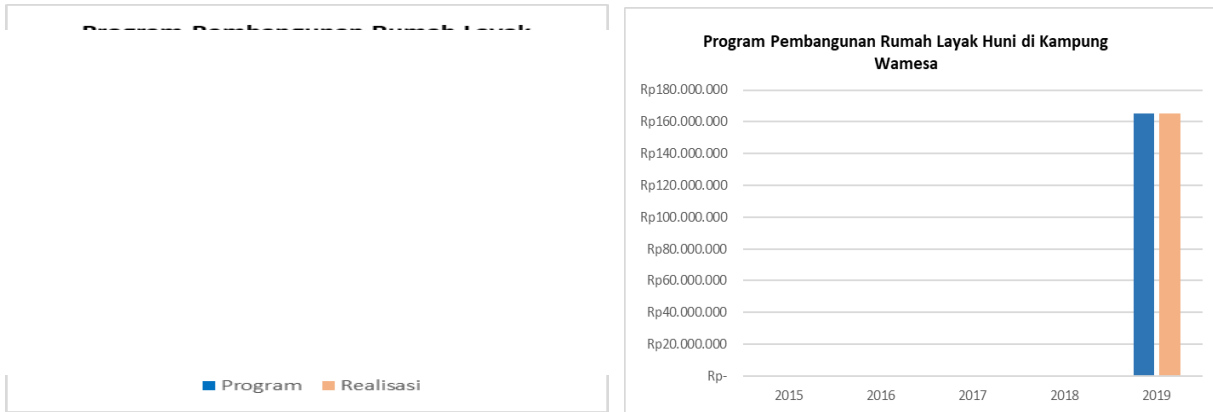


Gambar 8. Jumlah dan realisasi program pengentasan kesejahteraan sosial pada ke dua kampung, Wamesa dan Warkomi

**Kota dan Komunitas Berkelanjutan/  
Pembangunan Rumah Layak Huni di  
Kampung Wamesa dan Warkomi**

Kota pada dasarnya adalah permukiman dengan kompleksitas yang berbeda dan beragam. Kota harus dipahami sebagai permukiman yang berkembang lanjut untuk memenuhi kehidupan dan penghidupan warganya. Kebutuhan akan rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar utama manusia, banyak masyarakat memerlukan tempat yang layak untuk hidup/tinggal menetap. Kebutuhan akan rumah merupakan tugas dari pemerintah setempat, membangun serta memberikan tempat tinggal yang layak kepada masyarakatnya. Dengan tujuan agar masyarakatnya dapat menetap serta bersama pemerintah setempat membangun daerah tersebut. Banyak kampung yang terbentuk sejak di munculkannya dana desa, sehingga menjadi tugas pemerintah kampung setempat untuk menyejahterakan masyarakatnya lewat rumah layak huni.

Kampung Wamesa pada tahun 2019 memprogramkan pemberian BBR serta rehab rumah layak huni masyarakat sebesar Rp 164.945.835. Pemerintah Kampung Warkomi memprogramkan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat nya. Tahun 2015 dilakukan rehab rumah layak huni dengan alokasi pagu dana sebesar Rp 2.640.000, di tahun 2016 di realisasikan pembangunan rumah layak huni sebesar Rp 400.175.993. Kemudian di tahun 2017 dilakukan kegiatan pembangunan rumah layak huni sebesar Rp 575.726.625 dan bantuan BBR untuk rumah sebesar Rp 6.361.584. Pada tahun 2018 dilakukan kegiatan pembangunan rumah layak huni sebesar Rp 670.563.530 dan di tahun 2019 direalisasikan perbaikan rumah layak huni sebesar Rp 259.671.195. khusus Kampung Warkomi disetiap tahunnya selalu ada program dan realisasi rumah layak huni, hal ini dikarenakan hampir sebagian kepala keluarga di Kampung Warkomi tergolong keluarga pra sejahtera.



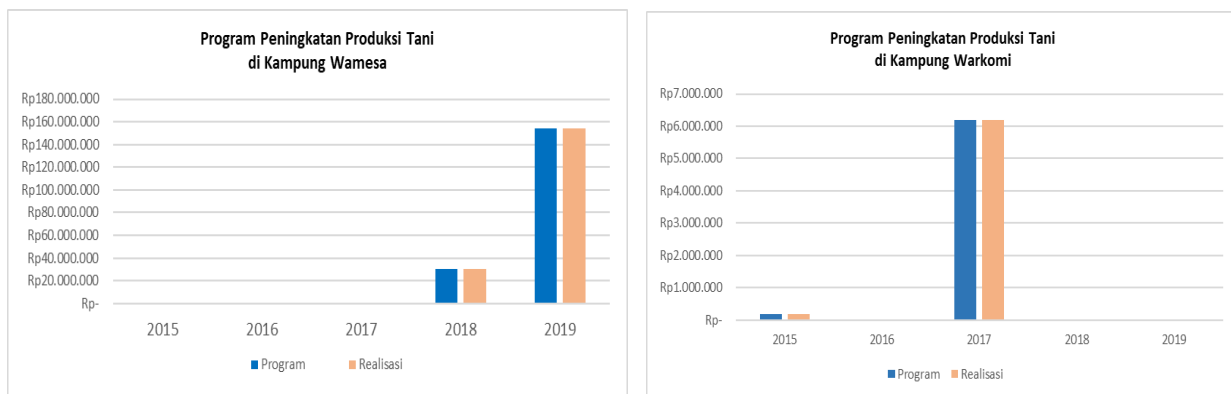
Gambar 9. Jumlah dan realisasi program pembangunan rumah layak huni pada ke dua kampung, Wamesa dan Warkomi

**Peningkatan Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab Kampung Wamesa dan Warkomi**

Peningkatan kesadaran lingkungan mengacu pada isu konsumsi berkelanjutan dan isu keadilan yang memiliki pengaruh besar pada keberlanjutan daya dukung lingkungan (Rachmadi 2013).

Kerusakan lingkungan secara langsung maupun tidak langsung merupakan dampak dari perilaku konsumsi manusia. Seyfang dan Paavola (2008) menyatakan bahwa kebijakan keberlanjutan lingkungan tidak berhasil jika tidak mampu mengurangi ketidaksetaraan distribusi kesejahteraan. Ketersediaan lahan yang subur membuat masyarakat bisa memanfaatkan sumberdaya alam untuk bertani,

guna memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari serta menambah penghasilan tambahan bagi keluarga. Hal ini membuat pemerintah setempat membantu dan menyediakan yang menjadi kebutuhan para petani. Pemerintah Kampung Wamesa pada tahun 2018 merealisasikan pelatihan pertanian, perkebunan, perikanan serta peternakan bagi masyarakatnya sebesar Rp 30.000.000 dan di tahun 2019 pemerintah kampung merealisasikan kegiatan pembukaan lahan pertanian sebesar Rp 83.639.000, Pengadaan alat pertanian dan bibit pertanian sebesar 52.475.000, pelatihan bimbingan teknis pertanian sebesar Rp 8.264.000 dan pengadaan bibit ternak sebesar Rp 10.050.00.



Gambar 10. Jumlah dan realisasi program peningkatan produksi tani pada ke dua kampung, Wamesa dan Warkomi

Pemerintah Kampung Warkomi telah membantu masyarakatnya dengan memberikan bantuan bibit pertanian pada tahun 2015 sebesar Rp 181.000 dan di tahun 2017 sebesar Rp 6.200.000 kepada masyarakat yang bermata pencharian petani.

**Penuntasan Kemiskinan**

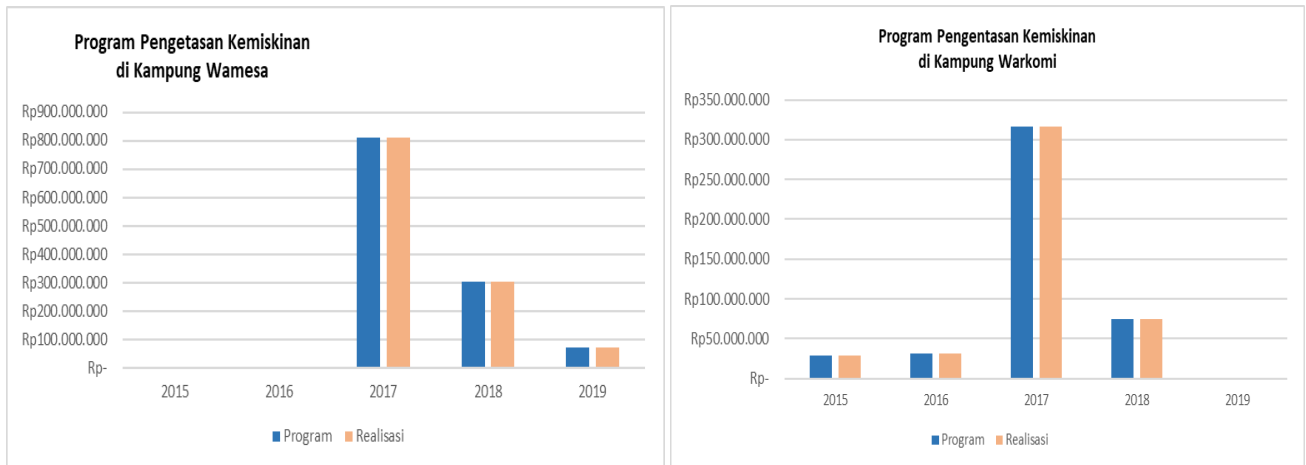
Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan dan penghidupan manusia, baik aspek ekonomi, politik, sosial budaya, psikologi, teknologi, dan lainnya, yang saling terkait secara erat satu dengan lainnya (Muana dkk. 2018).

Konsep kemiskinan dalam program dana desa di Papua ialah masuk dalam kategori rumah tangga miskin berpotensi (RTMB) dan dalam kondisi miskin rentan (RTMR). Kondisi kemiskinan yang sangat berpotensi, rata-rata masyarakatnya memiliki usia yang masih cukup produktif. Sebagian besar pekerjaan utama mereka (RTMB) adalah sebagai buruh, nelayan,

petani, pekebun bahkan ada yang memiliki pekerjaan sebagai buruh kasar. Masih terdapat kampung yang masih dalam kegelapan serta belum tersedianya air bersih serta masih terisolir belum

adanya jalur penghubung di darat. Sisi lain potensi ekonomi yang ada ialah usaha kios kampung yang hanya dimiliki oleh beberapa warga masyarakat. Sehingga keberadaan masyarakat yang lain belum merasakan perubahan ekonomi untuk kampung mereka maupun keluarga (Wahyunia dan Damayantib 2014).

Pada Kampung Wamesa dibuatlah jembatan beton penghubung dalam kampung sebesar Rp 653.221.400, penimbunan jalan sebesar Rp 65.500.000 dan pembangunan talud pinggir pantai sebesar Rp 92.274.050 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 dibangun lagi jembatan penghubung kampung dengan pagu kegiatan Rp 300.800.674 dan pada tahun 2019 direalisasikan pengerasan jalan kampung sebesar Rp 70.539.875.



Gambar 11. Jumlah dan realisasi program pengentasan kemiskinan pada ke dua kampung, Wamesa dan Warkomi

Sedangkan Kampung Warkomi direalisasikan dalam bentuk kegiatan penimbunan jalan padat karya dusun sebesar Rp 15.000.000, pembersihan lokasi pemukiman sebesar Rp 3.900.000, penebangan lokasi pemukiman

sebesar Rp 5.000.000 dan gorong-gorong jalan padat karya sebesar Rp 5.000.000 di tahun 2015. Pada tahun 2016 dilakukan kegiatan bantuan bagi masyarakat miskin sebesar Rp 32.000.000. Tahun 2018 direalisasikan kegiatan

pengerasan jalan rabat beton 1896 × 5M' sebesar Rp 316.125.200 dan pemukiman sebesar Rp 74.858.550.

### Kesimpulan

- a. Hasil indentifikasi dan analisis menjelaskan bahwa program pembangunan berkelanjutan yang dibiayai oleh dana desa di Kampung Wamesa dan Warkomi termasuk dalam kegiatan: pengentasan kelaparan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan yang baik, peningkatan pendidikan bermutu, kesetaraan gender, peningkatan air bersih dan sanitasi, peningkatan energi bersih dan terjangkau, tersedianya lapangan kerja dan ekonomi yang layak, pemerataan sosial, peningkatan pemukiman dan pengentasan kelaparan. Sedangkan program-program yang tidak dibiayai oleh dana desa antara lain industri, inovasi dan infrastruktur, kota dan komunitas berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem darat, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh dan kemitraan untuk mencapai tujuan.
- b. Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program kegiatan dana desa antara lain: keterbatasannya sumberdaya manusia yang terampil, terdidik dan memiliki kemampuan di bidang kerjanya, kurang adanya pemahaman terhadap tupoksi kerja masing-masing aparat di kampung terkait kegiatan yang sedang berjalan, disebabkan karena terbatasnya tingkat pendidikan yang di tempuh.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hendrianto. 1997. Model pembangunan perumahan dalam peremajaan permukiman Kumuh.
- Keraf SA. 2002. Etika lingkungan. Jakarta (ID): Penerbit Buku Kompas.
- Lenhart NM dan Read MH. 1989. Demographic profile and nutrient intake addressment of individual using emergency food program. Journal of The American Dietetic Association, 89 (9) 1989.
- Marwa J, Sardjono MA, Ruchaemi A, Devung S, Cabuy RL. 2019. Benefit sharing schema from the forest: Identifying potential distributions to customary communities in Teluk Bintuni District, Indonesia. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 67 (4): 963-972, doi.org/10.11118/actaun201967040963.
- Maulida I. 2016. Peran tenaga kerja Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional. Jurnal Gema Keadilan, 67 – 75.
- Muana N, Ester FHW, Rahayuningsih D, Dinayanti E, Aulia FM, Rismalasari M, Hafid M, Wahyu R, Putra RR, Kartika V, Widaryatmo. 2018. Analisis wilayah dengan kemiskinan tinggi. Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Purnomo VP. 2013 Pengaruh persepsi keadilan pada perilaku konsumsi berkelanjutan dalam perspektif dilema sosial. Jurnal Manajemen Teori dan Terapan, 6 (3), DOI: [10.20473/jmtt.v6i3.2674](https://doi.org/10.20473/jmtt.v6i3.2674).
- Raihan P. 2016 Manifestasi kesetaraan gender di perguruan tinggi. Jurnal Edukasi, 2 (2): 164-182.
- Seyfang G. and Paavola J. 2008. Inequality and sustainable consumption: bridging the gaps. Local Environment 13: 669-684.
- Sulistiari, Hargono R. 2018. Hubungan perilaku hidup sehat dengan status kesehatan masyarakat kelurahan ujung, Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Surabaya. Jurnal Promkes, 6 (1): 12–22.
- Surtiani EE. 2006. Faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya kawasan pemukiman kumuh di kawasan pusat kota (Studi kasus: Kawasan Pancuran, Salatiga).

[Tesis]. Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Turner JFC. 1972a. The reeducation of a professional. In: John F. C. Turner, & R. Fichter (Eds.), *Freedom to build* (pp. 122–147). New York: Macmillan.

Wahyunia RNT, Damayantib A. 2014. Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di

Provinsi Papua: Analisis spatial heterogeneity poverty-causing factors in Papua Province: Spatial heterogeneity analysis. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Badan Pusat Statistik Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 14 (2): 128-144.